

---

## ANALISA DETERMINAN KEMANDIRIAN KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

Mona Adriana<sup>1\*</sup>, Rinaldi Rustam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[mona.as@trisakti.ac.id](mailto:mona.as@trisakti.ac.id), <sup>2</sup>[rinaldi.rustam@trisakti.ac.id](mailto:rinaldi.rustam@trisakti.ac.id)

---

### Article History:

Received: 21-06-2024

Revised: 27-06-2024

Accepted: 24-07-2024

### Keywords:

Kemandirian Wilayah, PAD,  
DAK, PDRB, TPAK

**Abstract:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020. **Metode** - Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model panel. Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki realisasi DAK, PAD, PDRB, TPAK dengan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2016 - 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara DAK, PDRB, TPAK tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya penelitian ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pajak daerah agar kemandirian daerah dari kabupaten/kota semakin meningkat. Serta dapat lebih memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan belanja daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerah. Makalah ini berkontribusi pada literatur dengan berfokus pada determinan kemandirian yang terjadi di antara kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi determinasi kemandirian yang ada di Jawa Tengah

---

## PENDAHULUAN

Dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah di Indonesia secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-undang ini kemudian telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijakan, dan menetapkan undang-undang. (Undang-Undang RI No 33, 2004)

Karena Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. Selain itu, itu disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah landasan yang kuat untuk menjalankan otonomi daerah.

Kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah juga berubah karena sistem pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sementara sistem desentralisasi memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk memastikan pembangunan merata dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sistem sentralisasi dianggap kurang efisien. Selain itu, desentralisasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. (Fadli, 2002). Untuk alasan konseptual, ada tiga fungsi yang terpisah dalam kegiatan pemerintahan: alokasi, redistribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menghasilkan sebagian besar manfaat desentralisasi. Selain desentralisasi teritorial, kebijakan desentralisasi juga mengikuti desentralisasi anggaran, juga dikenal sebagai desentralisasi fiskal. (Stein, 1999)

Desentralisasi fiskal adalah pengalokasian keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah, serta memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan dilakukan pemerataan sesuai proporsi dan adil seiring dengan kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepada daerah. (Bank, 2011) Sehingga tidak hanya terfokus kepada dana perimbangan tetapi juga kemampuan daerah dalam mengelola potensinya. (Hirawan, 2006)

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kepada daerah kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional, serta dengan mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional secara adil, serta dengan mempertahankan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Selain itu, otonomi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kebutuhan Provinsi adalah wilayah otonom dan administrasi yang dipimpin oleh gubernur oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, antara lain. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah baik, ini menunjukkan seberapa baik aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan menentukan kebijakan di masa mendatang. (Kurniawan, 2016)

Menurut (Ernawati, 2017) otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah dan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi. dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh Pemerintah daerah di

Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat lebih mendominasi susunan APBD. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pembiayaan yang berasal Pemerintah Pusat atau pihak eksternal.

Kemandirian keuangan daerah adalah tujuan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Apabila PAD pemerintah daerah lebih besar daripada bantuan pusat, pemerintah kabupaten/kota dianggap mandiri. Apabila PAD kuat, daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat, yang akan mengurangi intervensi dari pemerintah pusat dan provinsi. PAD adalah salah satu indikator atau standar yang digunakan untuk mengukur seberapa bergantung suatu daerah pada pemerintah pusat secara keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU), bersama dengan PAD menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

**Tabel 1 Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Tengah**

<b>Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pendapatan (Juta rupiah)</b>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	11,541,029	12,547,512	13,711,831	14,112,159	13,669,303	14,697,721
DANA PERIMBANGAN	8,017,297	11,967,786	10,933,711	11,787,397	11,632,689	11,871,856
LAIN-LAIN	74,249	87,875	56,703	86,688	91,564	65,712
TOTAL PENERIMAAN	19,632,575	24,603,173	24,702,245	25,986,244	25,393,556	26,635,289
<b>RASIO KEMANDIRIAN JAWA TENGAH</b>	0.59	0.51	0.56	0.54	0.54	0.55

Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk menjalankan urusan pemerintahannya, membangun wilayah otonom, dan menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memperluas desentralisasi fiskal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Dengan bantuan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah untuk mengelola PAD dan transfer ke daerah dapat berdampak pada pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pusat kepada Daerah-Daerah, dan berbagai pemasukan lainnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari tahun 2016 hingga 2021, pendapatan Provinsi Jawa Tengah rata-rata meningkat 8 persen. Dana perimbangan juga tampaknya memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan penerimaan daerah dengan persentase dari tahun ke tahun lebih dari 40 % dengan proporsi terbesar adalah dari DAU dan DAK.

Tabel 3 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan memiliki rasio kemandirian lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat untuk

membayai pengeluaran daerahnya. Bahkan provinsi DI Yogyakarta memiliki rasio kemandirian yang lebih rendah dari 50%.

**Tabel 2 Tingkat kemandirian Provinsi di Pulau Jawa**

KEMANDIRIAN			
	2018	2019	2020
Provinsi DKI Jakarta	0.71	0.68	0.69
Provinsi Jawa Barat	0.58	0.56	0.62
Provinsi Jawa Tengah	0.56	0.53	0.59
Provinsi DI Yogyakarta	0.37	0.36	0.43
Provinsi Jawa Timur	0.58	0.58	0.63

Sumber : Data diolah

Menurut (Halim, 2012) Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah disebut kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditentukan oleh seberapa besar PAD suatu daerah. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin sedikit ketergantungan pemerintah pusat terhadap bantuan.

Saat ini, hampir semua pemerintah daerah masih menerima DAU dari pemerintah pusat; hanya pemerintah DKI Jakarta yang tidak menerimanya. Dengan demikian, pemerintah daerah lain masih menerima DAU, yang berarti mereka masih memiliki celah fiskal atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah secara keseluruhan tidak dapat mandiri karena Pendapatan Asli Daerah. Sari (2015) melakukan penelitian yang hampir sama dengan variabel independen Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, sementara Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif. Variabel belanja modal, di sisi lain, memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif. Sedangkan variabel belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian.

Sementara PDRB memiliki peran pula dalam pembentukan kemandirian suatu daerah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adiyanto, 2020) PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa selama 2015 sampai dengan 2020.

Dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menurut (Annafi, 2020) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Tahun pengamatan yang dilakukan dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019, memberikan hasil TPAK berpengaruh secara positif terhadap kemandirian daerah. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang *"Analisa faktor yang mempengaruhi Kemandirian Daerah Provinsi Jawa Timur"*

#### a. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan TPAK terhadap kemandirian wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah?

**b. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kemandirian antar wilayah. Pada bagian akhir tulisan juga ditawarkan saran kebijakan sebagai upaya mewujudkan perekonomian yang lebih merata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
2. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
3. Untuk menganalisa pengaruh PDRB terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah
4. Untuk menganalisa pengaruh TPAK terhadap kemandirian Wilayah di kabupaten/kota provinsi Jawa tengah

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor- faktor terhadap kemandirian wilayah kab/kota provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2016 – 2020 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK, TPAK, PDRB dan Indeks kemandirian

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Artinya, penelitian ini dibentuk berdasarkan data yang bersumber pada data sekunder, jurnal, artikel, studi literatur dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan untuk melakukan analisis kuantitatif digunakan pendekatan metode panel data dengan menggunakan software *Eviews 9.0*

Variabel penelitian yang digunakan untuk mengestimasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3 Variabel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Skala Variabe; D</b>
<b>Dependen</b>	Indeks Kemandirian	Skala Ratio
<b>Independen</b>	PAD	Skala Ratio
	DAK	Skala Ratio
	PDRB	Skala Ratio
	TPAK	Skala Ratio

**Persamaan**

Rancangan model yang akan diajukan adalah model regresi linear dengan sembilan variabel independen dan dengan satu variabel dependen yakni ketimpangan wilayah. Spesifikasi model tersebut secara ekonometrika sebagai berikut:

$$KD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 TPAK_{it} + e_{it}$$

yang mana:

KD : Kemandirian Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1$  s/d  $\beta_{10}$ : Koefisien Variabel Independen

$e$  : *Residual/error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Pemilihan Model

#### 1. Hasil Estimasi Uji Chow

Effect Test	Statistics	d.f	Prob.
Cross-section F	12.265105	(34.206)	0.0000
Cross-section Chi-square	271.139578	34	0.0000

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel 4.2, dihasilkan Prob. Cross-section Chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$  (alpha 5%) yang artinya  $H_a$  gagal ditolak sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah FEM atau Fixed Effect Model.

#### 2. Hasil Estimasi Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistics	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-section Random	18.0497	4	0.08

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4.3, dihasilkan Prob. Cross-section random sebesar  $0,08 > 0,05$  (alpha 5%) yang artinya  $H_0$  gagal ditolak sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah REM atau Random Effect Model.

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, model terbaik dalam data panel yang diunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dengan hasil regresi sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.194808	0.052014	3.741419	0.0002
PAD	0.000218	1.93 E-05	11.27546	0.0000
PDRB	-8.28E-06	9.22E-05	-0.089808	0.9285
TPAK	-0.001314	0.000683	-1.925013	0.0556
DAK	-5.80E-05	3.47E-05	-1.670975	0.0962
Adjusted R <sup>2</sup>	0.7912114			
F-statistic	25.46636			
Prob (F-statistic)	0.000000			

### Pengaruh PAD terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil estimasi model PAD memiliki angka koefisien sebesar 0.000218 se dapat diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah, dimana setiap kenaikan PAD sebesar satu satuan maka ketimpangan wilayah akan meningkat

sebesar 0.000218, begitupun sebaliknya. Kemudian, prob t-statistik sebesar 0,0000, yang artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti, 2022)), serta penelitian yang dilakukan oleh (Shalshyabilla, 2023)) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah

Hal ini disebabkan karena ketika sebuah daerah memiliki PAD yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Di sisi lain batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah adalah ketika daerah mampu memiliki PAD sebesar 20 % dari total penerimaan daerah baru daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mandiri.

Selain itu ketika suatu kabupaten/kota memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan PAD akan mendorong daerah tersebut untuk meningkatkan belanja infrastruktur yang akhirnya berdampak dengan meningkat pertumbuhan ekonomi Di sisi lain semakin tingginya PAD suatu daerah yang pada akhirnya akan membuat daerah tersebut dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat, dengan kata lain daerah dapat menjadi daerah yang mandiri tanpa bantuan pihak luar dengan mengandalkan penerimaan daerah itu sendiri.

#### **Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil estimasi model, retribusi daerah memiliki angka koefisien sebesar  $-8.28E-06$  sehingga dapat diartikan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah, dimana setiap kenaikan PDRB sebesar satu satuan maka kemandirian daerah akan menurun sebesar 0.000194, begitupun sebaliknya. Nilai prob t-statistik  $0.9285 > 0.5$  artinya PDRB berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2018) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena PDRB menunjukkan tingkat perekonomian suatu wilayah, tetapi tidak secara langsung menunjukkan apakah wilayah tersebut mandiri. Akibatnya, meskipun PDRB meningkat, kemandirian keuangan wilayah tersebut tidak akan berubah jika pendapatannya tidak meningkat.

#### **Pengaruh TPAK terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil estimasi model, TPAK memiliki angka koefisien sebesar  $-0.001314$  artinya variabel TPAK memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah, dimana setiap kenaikan TPAK sebesar satu satuan maka Kemandirian Daerah akan menurun sebesar 0.001314, begitupun sebaliknya. Nilai prob t-statistik sebesar 0.0056, yang artinya walaupun secara statistik di atas 0,05 artinya pengaruh TPAK tidak signifikan terhadap kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indra, 2022) dimana besarnya TPAK tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kemandirian daerah.

#### **Pengaruh DAK terhadap Kemandirian di Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil estimasi model, DAK memiliki angka koefisien sebesar  $-5.80E-05$  sehingga dapat diartikan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah, dimana setiap DAK mengalami penurunan sebesar satu satuan maka kemandirian daerah akan meningkat sebesar  $5.80E-05$ , begitupun sebaliknya. Hasil prob t-statistik

0.0962, artinya DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh (Setiawan, 2021). Hal ini dapat disebabkan karena alokasi dari dana tersebut baik fisik dan non fisik tidak memberikan dampak langsung terhadap kemandirian daerah, dimanasalah satunya DAK lebih difokuskan untuk Pendidikan baik fisik maupun non fisik

### KESIMPULAN

1. Variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah
2. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah
3. Variabel TPAK memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah
4. Variabel DAK memiliki pengaruh yang Negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiyanto, D. (2020). Faktor Yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Kab/Kota Pulau Jawa.
- [2] Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan*.
- [3] Anikmah. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal KPN STAN*.
- [4] Annafi. (2020). Determinasi Kemandirian Keuangan Pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa tengah.
- [5] Bank, B. K. (2011). *Analisis Hubungan Dana Perimbangan Dengan Kinerja Pelayanan jasa Publik di Indonesia*. Jakarta: Decentralizatio Support Facility.
- [6] Elmi. (2002). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan
- [7] Fadli, F. (2002). Fiscal Decentralization and Regional Disparity in East and West Indonesia V 3URYLQFHV. *media neliti*.
- [8] Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Hirawan. (2006). Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 63-82.
- [10] Indra, A. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Pada Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *EQUITY*.
- [11] Karamina. (2023). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Sumatera BArat. *scholar.unand*.
- [12] Kurniawan, B. (2016). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *Islamic Economics Journal*, 1-26.
- [13] Lakshita, R. (2019). Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *eprimys.uty*.
- [14] Nilam, I. a. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan. *Jurnal Harian*
- [15] *Regional*

- [16] Nina. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- [17] Novianti, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 244-250.
- [18] Oktafia, A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timu. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- [19] Pratiwi, E. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Pematangsiantar. *JAMIN*.
- [20] Reza, M. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP*.
- [21] Sari. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Velanja Modal Terhadap Tigkat kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kausus pada Kab/Kota di DIY).
- [22] Setiawan. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera 2010-2016. *Beranda*.
- [23] Shalshyabilla. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *EBBANK*.
- [24] Stein, E. (1999). Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America. *Journal of Apllied Economics* , 357-391.
- [25] sumiyarti. (2005). Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok. *Media Ekonomi*.
- [26] Tahun, U. n. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>. Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- [27] tahun, U. n. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>. Retrieved from Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- [28] Utami. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* .

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN